



## **Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam**

**Cinta Rahmi**

Stie Ganesha

**Iqbal Risyad Fadhillah**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

**Adam Hamzah Danuri**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

**Muhammad Rizky Ikhwan**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

**Muhammad Irsyad**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Alamat: Jl. Ir H. Juanda No.95,

Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Korespondensi Penulis: [cinta@stieganasha.ac.id](mailto:cinta@stieganasha.ac.id)

### **Abstrak**

*The role of electronic money in increasing the effectiveness of monetary policy in Indonesia. In recent years, the use of electronic money in Indonesia has experienced significant growth, driven by the increasing adoption of digital technology and people's preference for non-cash transactions. Electronic money has a positive impact on monetary stability through increasing transparency and accuracy of transaction data, which allows Bank Indonesia (BI) to monitor and control inflation more effectively. In addition, the use of electronic money strengthens monetary policy transmission, where changes in interest rates can directly influence transaction costs and consumption and investment behavior of the public. On the other hand, electronic money also contributes to the stability of the financial system by reducing the risk of fraud and increasing financial inclusion, providing access to financial services to previously unreachable populations. Technological innovations in digital payments, such as QRIS, expand the digital financial ecosystem and support transaction efficiency and security. This research also highlights the relevance of electronic money in the context of sharia economics, where the principles of transparency, accountability and social justice prioritized in sharia can be fulfilled through the use of electronic money. Thus, electronic money not only strengthens the effectiveness of monetary policy but also supports financial system stability and financial inclusion in Indonesia, while also complying with sharia principles.*

*Keywords: Electronic Money, Monetary Policy, Effectiveness*

### **Abstrak.**

Peran uang elektronik dalam meningkatkan efektivitas kebijakan moneter di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan uang elektronik di Indonesia telah

## **Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam**

mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya adopsi teknologi digital dan preferensi masyarakat terhadap transaksi non-tunai. Uang elektronik memberikan dampak positif terhadap stabilitas moneter melalui peningkatan transparansi dan akurasi data transaksi, yang memungkinkan Bank Indonesia (BI) untuk memantau dan mengendalikan inflasi dengan lebih efektif. Selain itu, penggunaan uang elektronik memperkuat transmisi kebijakan moneter, dimana perubahan suku bunga dapat langsung mempengaruhi biaya transaksi dan perilaku konsumsi serta investasi masyarakat. Di sisi lain, uang elektronik juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dengan mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan inklusi keuangan, menyediakan akses ke layanan keuangan bagi populasi yang sebelumnya tidak terjangkau. Inovasi teknologi dalam pembayaran digital, seperti QRIS, memperluas ekosistem keuangan digital dan mendukung efisiensi serta keamanan transaksi. Penelitian ini juga menyoroti relevansi uang elektronik dalam konteks ekonomi syariah, dimana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial yang diutamakan dalam syariah dapat terpenuhi melalui penggunaan uang elektronik. Dengan demikian, uang elektronik tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan moneter tetapi juga mendukung stabilitas sistem keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia, sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : Uang Elektronik, Kebijakan Moneter, Efektivitas

### **PENDAHULUAN**

Indonesia dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat dan beragam. Selain itu, faktor kenyamanan dan efektivitas biaya juga menjadi alasan mendasar mengapa masyarakat lebih memilih pembayaran non-tunai (Ismanda, 2019; Lintang Sari et al., 2018; Fatmawati & Yuliana, 2019). Percepatan sistem pembayaran digital telah mengubah preferensi digital masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi lebih banyak uang tunai. Peningkatan transaksi non-tunai dapat meningkatkan transparansi peredaran uang dan mengurangi permintaan uang tunai (Forrest et al., 2018; Popovska-Kamnar, 2014).

Bank Indonesia selaku regulator sistem pembayaran menerbitkan Peraturan Uang Elektronik melalui Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) No.20/6/PBI/2018. Telah diketahui banyak bermunculan perusahaan-perusahaan financial technology dengan berbagai inovasinya di bidang layanan pembayaran digital. Bank Indonesia juga telah menjalin kerja sama dalam bentuk open banking untuk meredam maraknya virtual banking (bank bayangan). Untuk mempermudah sistem pembayaran, Bank Indonesia juga merilis sistem Quick Response Indonesia Standard (QRIS) pada awal tahun 2020. Untuk memastikan kelancaran sistem baru ini, Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan berdasarkan empat pilar: peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses, dan perlindungan konsumen (Bank Indonesia, 2019).

Kebijakan moneter (Durgun & Timur, 2015; Ngotran, 2016; Rogoff, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi akan mengubah perilaku pelaku ekonomi sehingga dapat bertindak lebih nyaman, mudah, dan cepat sehingga meminimalisir biaya transaksi

yang tinggi, sehingga mempengaruhi perubahan produksi dan harga (Wulandari et al., 2016; Slozko & Pelo, 2014). Gangguan terhadap uang elektronik akan berdampak pada pemberlakuan suku bunga rendah dan mendorong pertumbuhan kredit, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas keuangan. Di sisi lain, dari sudut pandang stabilitas harga, perkembangan uang elektronik dapat mempengaruhi kecepatan peredaran uang, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi inflasi (Galı, 2015; Lenka & Bairwa, 2016; Tule & Oduh, 2017)

Meningkatnya adopsi uang elektronik di Indonesia membawa berbagai dampak terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian, dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mencakup pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan pengaturan sistem pembayaran. Namun seiring dengan meningkatnya penggunaan uang elektronik, muncul beberapa tantangan baru dalam implementasi kebijakan moneter. Salah satunya adalah perubahan pengelolaan likuiditas dan pola peredaran uang. Uang elektronik dapat mempengaruhi pengukuran dan perputaran uang beredar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter.

Di sisi lain, uang elektronik juga mempunyai potensi besar dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan inklusi keuangan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan uang elektronik, Bank Indonesia akan memiliki alat yang lebih efektif untuk mengumpulkan data transaksi dan memantau pergerakan uang dalam perekonomian.<sup>3</sup> Hal ini akan membantu mengembangkan kebijakan moneter yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi perekonomian yang dinamis. Mengingat peran strategis uang elektronik dalam perekonomian modern, penting untuk mempertimbangkan bagaimana inovasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Indonesia. Di sisi lain, uang elektronik juga mempunyai potensi besar dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan inklusi keuangan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan uang elektronik, Bank Indonesia akan memiliki alat yang lebih efektif untuk mengumpulkan data transaksi dan memantau pergerakan uang dalam perekonomian.

Hal ini akan membantu mengembangkan kebijakan moneter yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi perekonomian yang dinamis. Data transaksi uang elektronik memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perilaku konsumen, pola belanja, dan arus keuangan, yang dapat sangat berguna bagi para pembuat kebijakan. Selain itu, uang elektronik membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan dan keamanan pembayaran. Hal ini sangat penting dalam konteks perekonomian yang semakin terhubung dan berubah dengan cepat saat ini. Peningkatan efisiensi memungkinkan sektor riil beroperasi lebih efisien, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan risiko dan tantangan yang terkait dengan perkembangan uang elektronik. Untuk menggunakan uang elektronik dengan aman dan stabil, permasalahan seperti keamanan siber, perlindungan informasi pribadi, dan risiko sistemik dalam sistem pembayaran perlu

## **Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam**

diatasi. Mengingat peran strategis uang elektronik dalam perekonomian modern, penting untuk mempertimbangkan bagaimana inovasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Indonesia.

Beberapa penelitian mengenai dampak uang elektronik terhadap efektivitas kebijakan moneter menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan kajian Sukmonkongsamoe (2019), pertumbuhan e-money didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan hadirnya transaksi e-transaksi tidak menyebabkan gangguan terhadap metode pembayaran tradisional, sehingga e-money merupakan sebuah negara yang mampu meningkatkan efektivitas. Di sisi lain, studi Hendry & Zhu (2019) menemukan bahwa peningkatan uang elektronik dapat menyebabkan perubahan perputaran uang, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan moneter di negara yang menggunakan jumlah uang beredar sebagai tujuan kebijakan moneter. Hal ini berbeda dengan temuan Griffith & Stephen (2004) dan Fabris (2019) yang menunjukkan bahwa volume uang elektronik masih kecil dibandingkan lainnya dan tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan moneter.

### **KAJIAN TEORI**

Teori ekonomi moneter adalah teori ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Dengan kata lain membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Lalu adapun keterkaitan teori ini dengan materi dan judul yang kami ambil, yaitu :

#### **1. Teori Permintaan dan Penawaran Uang**

Dalam ekonomi Islam, permintaan dan penawaran uang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya riba (bunga). Perkembangan uang elektronik dapat mempengaruhi permintaan uang karena mempermudah transaksi dan mengurangi kebutuhan untuk uang tunai. Namun, penawaran uang dalam sistem ekonomi Islam juga harus diawasi agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

#### **2. Teori Tingkat Suku Bunga Nol**

Ekonomi Islam mengedepankan penggunaan sistem bagi hasil sebagai pengganti suku bunga. Uang elektronik bisa mempermudah implementasi bagi hasil melalui platform digital yang transparan dan efisien. Analisis dampak uang elektronik terhadap kebijakan moneter dalam konteks ini bisa difokuskan pada bagaimana uang elektronik mendukung atau menghambat sistem bagi hasil tersebut.

#### **3. Teori Fungsi Uang dalam Islam**

Dalam ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai, sama seperti dalam ekonomi konvensional. Namun, uang dalam ekonomi Islam tidak boleh digunakan untuk tujuan spekulatif. Uang elektronik dapat

meningkatkan fungsi- fungsi ini jika diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari spekulasi dan riba.

#### 4. Teori Stabilitas Moneter dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai stabilitas harga dan keseimbangan ekonomi. Uang elektronik bisa berperan dalam memperkuat stabilitas moneter dengan mempermudah transmisi kebijakan moneter, seperti pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi transaksi. Namun, perlu diperhatikan juga risiko yang mungkin timbul, seperti risiko keamanan siber dan penyalahgunaan teknologi.

#### 5. Teori Keuangan Publik Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, keuangan publik diatur melalui zakat, wakaf, dan dana sosial lainnya yang berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial.

Uang elektronik bisa mendukung kebijakan ini dengan mempermudah pengumpulan dan distribusi dana zakat dan wakaf secara lebih efisien dan transparan.

#### 6. Teori Kesejahteraan Sosial dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam juga berfokus pada kesejahteraan sosial. Penggunaan uang elektronik dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Ini dapat mendukung kebijakan moneter yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

### Perkembangan Uang Elektronik

Awalnya uang sebagai alat tukar dikongkritkan dalam bentuk tertentu, seperti uang logam dan uang kertas. Namun seiring dengan perkembangan financial technology memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik, guna memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai (*less cash*), sehingga nantinya tercipta *less cash society*. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “uang elektronik” (*electronic money atau e-money*), seperti internet banking, debitcards, dan automatic teller machine (ATM) cards. Evolusi uang tidak berhenti disini. “Uang elektronis” juga muncul dalam bentuk smart cards, yaitu penggunaan chips pada sebuah kartu. Penggunaan smart cards sangat praktis, yaitu dengan “mengisi” chips dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.

## Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam

Pesatnya perkembangan teknologi dan keinginan untuk memberikan nilai tambah pada nasabah membuat bergesernya sistem pelayanan bank. Bank dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada nasabah, telah berevolusi dari model konvensional *face to face* dan didasarkan pada paper document ke model layanan dengan model *non face to face* dan digital. Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik.

### Hubungan antara Jumlah Uang Beredar (JUB) dengan Uang Elektronik (*E-Money*)

Sejauh ini belum terdapat indikator pengukur perkembangan alat pembayaran non tunai yang secara resmi digunakan di Indonesia. Pengukuran indikator perkembangan pembayaran non tunai pada berbagai studi umumnya menggunakan data perkembangan volume transaksi melalui alat pembayaran menggunakan kartu seperti ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Selain itu, beberapa indikator rasio seperti rasio antara konsumsi swasta terhadap uang kartal di masyarakat dan rasio uang tunai terhadap M1 juga dapat digunakan sebagai indikator perkembangan pembayaran non tunai.

Saat ini definisi uang di Indonesia masih membagi Uang Beredar dalam arti luas dan dalam arti sempit dengan persamaan sebagai berikut:  $M1 = \text{Uang Kartal} + \text{Uang Giral}$   
 $M2 = M1 + \text{Time Deposits (simpanan berangka)} + \text{Saving Deposits (simpanan)}$  Namun, berdasar karakteristik Uang Elektronik, dimana float adalah dana milik Pemilik Uang Elektronik atau merchant yang setiap saat dapat digunakan sebagai alat pembayaran, maka sifat float e-money adalah sangat likuid, atau dapat disetarakan dengan uang tunai dan giro, maka selayaknya *float e-money* diperhitungkan sebagai bagian dari M1.  $M1 = \text{Currency (uang kartal)} + \text{Demand Deposits (uang giral)} + \text{Float}$   
 $M2 = M1 + \text{Time Deposits (simpanan berangka)} + \text{Saving Deposits (simpanan)}$  Berdasar dari Kajian Siti Hadayani dampak e-money terhadap efektivitas monetary agregat (M1) sebagai indikator moneter yaitu, penerbitan Uang Elektronik dengan setoran tunai ataupun atas beban rekening nasabah pada bank umum, tidak akan merubah jumlah uang beredar dalam arti luas (M2), namun akan menyebabkan pergeseran dari uang kuasi (*time deposits atau saving deposits*) menjadi M1 (dalam bentuk float)

Apabila Pemilik Uang Elektronik melakukan pengisian ulang (*top up*) dengan setoran tunai, maka yang terjadi hanyalah pergeseran (*shifting*) dari Currency menjadi float, sehingga tidak terjadi perubahan pada Jumlah Uang Beredar (M1 dan M2). Namun, demikian, terjadi pergeseran di dalam komponen M1, dari *currency* menjadi *float*. Demikian halnya apabila Pemilik Uang Elektronik melakukan *top up* atas beban rekening giro nasabah pada bank umum (*demand deposits*), tidak terjadi perubahan pada M1 dan

M2, hanya terjadi pergeseran komponen M1, dari demand deposits menjadi Float. Namun, apabila Pemilik Uang Elektronik melakukan top up atas beban rekening tabungan dan simpanan berjangka nasabah pada bank umum (*time deposits dan saving deposits*), maka akan terjadi peningkatan M1 yang berasal dari float. M2 tidak akan mengalami perubahan, karena hanya terjadi pergeseran (*shifting*) dari uang kuasi (tabungan atau simpanan berjangka) menjadi M1 (dalam bentuk float). Berdasar Kajian dari Siti Handayani, dengan belum dimasukkannya perhitungan float ke dalam definisi M1 maka mengasumsikan bahwa kebijakan pengurangan Jumlah Uang Beredar (M1) akan mendorong masyarakat untuk berpindah menjadi pengguna Uang Elektronik. Diringi dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan semakin tersedianya fasilitas yang mendukung maka berkurangnya M1 akan memindahkan masyarakat untuk melakukan transaksinya dengan menggunakan Uang Elektronik, maka penggunaan Uang Elektronik diasumsikan akan semakin melonjak.

### **Permintaan Uang Menurut Ekonomi Islam**

Menurut kalangan Ekonomi Islam bahwa uang bukanlah modal. Sementara ini orang kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang diartikan dengan modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak masyarakat luas (*public good*). Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Jika uang sebagai flow concept sementara modal adalah stock concept. Flow concept mengibaratkan uang seperti air yang selalu mengalir. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Sedangkan Stock Concept diibaratkan air berhenti (tidak mengalir secara wajar) maka air tersebut menjadi busuk dan bau, demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara, jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian.

Uang dalam pespektif ekonomi islam adalah alat untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya. Jumlah uang tunai yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya berdasarkan hanya motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga, merupakan fungsi dari tingkat pendapatan. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan atas uang oleh masyarakat, untuk tingkat pendapatan tertentu uang yang idle (menganggur) akan dikenakan zakat.

Ekonomi Islam tidak mengenal konsep Time value of money. Konsep nilai uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini lebih bernilai karena dapat berinvestasi dan bisa mendapatkan bunga, atau nilai uang yang berubah (cenderung menurun) dengan berjalannya waktu.

## **Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam**

Kritik atas Time Value of money adalah setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat positive, negative, atau no return. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu dikenal risk- return relationship. Sedangkan, Economic Value of Time faktor yang menentukan waktu adalah sebagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakan

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka (library research). Adapun pengertian dari metode penelitian kualitatif menurut (Bogdan dan Taylor, 1992), mereka mengartikan bahwasanya penelitian kualitatif termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail. Lalu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyimpulkan bahwa metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengalaman yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Sedangkan teknik studi pustaka (library research) menurut (Mestika Zed, 2008), studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, termasuk di Indonesia. Uang elektronik (electronic money) merupakan salah satu inovasi utama di bidang keuangan yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Peningkatan penggunaan uang elektronik di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, jumlah transaksi uang elektronik meningkat signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi uang elektronik meningkat dari Rp47,2 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp145,2 triliun pada tahun 2020. Kedua, jumlah penerbit uang elektronik yang juga semakin meningkat baik di sektor perbankan maupun non-perbankan, menunjukkan tingginya minat terhadap pasar ini. Faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan uang elektronik di Indonesia adalah penyebaran Internet dan meningkatnya tingkat penetrasi ponsel pintar. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 73,7% penduduk Indonesia terhubung ke internet pada tahun 2020, dengan mayoritas menggunakan ponsel pintar sebagai perangkat utama untuk mengakses internet. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah dan Bank Indonesia juga berperan penting. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan seperti PBI No. untuk menjamin keamanan dan efisiensi penggunaan uang elektronik. Juni 20, 2018 Tentang uang elektronik

Uang elektronik (juga dikenal sebagai e-money) adalah suatu bentuk uang yang disimpan secara elektronik, biasanya pada kartu atau perangkat lain. E-money memungkinkan melakukan pembayaran elektronik dengan cepat dan mudah untuk berbagai transaksi, termasuk pembelian barang dan jasa secara online dan offline. Sistem ini biasanya dioperasikan oleh lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan yang mempunyai izin untuk menawarkan dan mengelola uang elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Berdasarkan medianya uang elektronik yaitu uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Berdasarkan masa berlakunya uang elektronik dibedakan menjadi dua: Reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan Top up atau pengisian ulang, dan Disposable uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang.

Berdasarkan tercatat atau tidaknya identitas pemegang uang elektronik dibedakan menjadi dua: Registered adalah uang elektronik yang terdaftar dan tercatat identitas pemegangnya, dan Unregistered adalah uang elektronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat identitas pemegangnya. Batas maksimal nilai uang elektronik Unregistered sebesar 2 juta Rupiah dan Registered sebesar 10 juta Rupiah. Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain: pertama, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (top up).

Kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. Keempat, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukakan setiap saat oleh pemegang. Dan kelima, Refund/Redeem yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir.

Sistem moneter berhubungan erat dengan instrumen moneter, salah satunya uang, maka sebelum memahami mengenai hal tersebut, kita perlu memahami konsep uang dalam Islam. Menurut Al-Ghazali, uang adalah standar pengukuran (satuan) untuk menghindari penipuan dan kecurangan, uang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem barter, dinar dan dirham adalah penguasa bila dibandingkan jenis kekayaan yang lain dan ciri utama uang adalah seperti cermin yang memantulkan warna tapi ia sendiri tidak memiliki warna sesuai dengan konsep netralitas uang Sedangkan

## **Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam**

menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah standar nilai (*mi'yar alamwal*) dan merupakan alat tukar, selain itu uang tidak pernah dimaksudkan untuk dikonsumsi. Uang itu digunakan untuk mendapatkan barang lain (alat tukar) dan tidak untuk diperdagangkan.

Mengemukakan tentang konsep volume fulus (uang) haruslah proporsional dengan volume transaksi dimana tingkat harga ditentukan, dan konsep ini dalam teori konvensional disebut sebagai *quantity theory of money*.<sup>68</sup> Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, uang adalah standar pengukuran dan juga merupakan *store of value* (penyimpan nilai). Menurut Ibnu Khaldun emas dan perak merupakan bentuk uang yang tidak mudah berfluktuasi yang relatif stabil. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah tercapainya kondisi *Full Employment* dimana seluruh faktor produksi dapat dioptimalkan penggunaannya, menjamin stabilitas nilai mata uang dan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan alat redistribusi kekayaan dimana harta disinergiskan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Sementara itu fungsi bank sentral adalah mengatur peredaran uang dan mengendalikan *money supply*, sebagai regulator *financial market* dan menjamin kejujuran laporan keuntungan dan kerugian sektor perbankan dan melaksanakan audit secara reguler. Selain itu, fungsi bank sentral dapat dilakukan melalui instrumen moneter seperti merubah *high powered money* (uang primer), melalui *reserve ratio*, *liquidity ratio*, penjualan dan pembelian *Central Deposit Certificate* dan surat-surat berharga lainnya, merubah *profit-sharing ratio*, menetapkan *qard hassan ratio* dan mengendalikan nilai tukar mata uang.

Ada tiga perbedaan mendasar atas sistem moneter Islam dengan sistem moneter konvensional. Perbedaan pertama pada sisi konvensional adalah uang fiat (biasanya dalam bentuk kertas atau koin) yang diakui sebagai alat tukar yang sah di suatu negara setelah ditetapkan oleh pemerintahnya yang tidak memiliki nilai cadangan sesuai nilai nominalnya. Diterbitkannya uang fiat memunculkan daya beli baru dari sesuatu yang tidak ada. Hal ini memberikan keuntungan yang tidak adil (*seigniorage*) bagi pihak yang diberi kuasa untuk menerbitkannya dan dapat dikategorikan *riba*. Sedangkan uang dalam Islam adalah uang (emas dan perak) yang mempunyai nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya atau sejumlah dengan cadangan emas yang disimpan oleh pihak yang menerbitkannya. Karena tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada *seigniorage*), sehingga tidak mengandung unsur *riba*. Karena Indonesia masih menggunakan sistem moneter dan perbankan ganda, maka yang menjadi perbedaan utama antara sistem moneter Islam dan konvensional adalah adanya konsep bagi hasil dalam Islam yang meniadakan bunga.

Perbedaan yang kedua, pada sisi konvensional ada sistem *fractional reserve banking* dimana bank hanya diwajibkan untuk menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun. Dengan sistem ini perbankan memiliki kemampuan menciptakan jenis lain dari fiat money, yaitu uang bank (*demand deposits*, termasuk uang elektronik), dan hal ini terjadi juga ketika bank memberikan pinjaman. Dengan demikian sistem ini juga memberikan keuntungan *seigniorage* yang tidak adil bagi pihak bank yang

melalui sistem ini diberi kuasa untuk menciptakan uang baru. Sedangkan pada sistem ekonomi Islam ada seratus persen reserve banking system, dimana sistem ini tidak memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan uang baru, karena seluruh cadangan harus disimpan ke bank sentral. Bank maksimum hanya dapat menyalurkan pembiayaan sampai sebesar simpanan awal saja. Hal ini menyebabkan tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada seigniorage), maka tidak mengandung unsur riba dan tidak ada pihak yang dirugikan. Perbedaan yang terakhir dan paling mendasar adalah sistem bunga dalam ekonomi konvensional sedangkan ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang timpang dalam menanggung kerugian. Pada saat pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jikalau menghasilkan keuntungan dibagi berdua, namun jika terjadi kerugian juga ditanggung bersama.

## KESIMPULAN

Penggunaan uang elektronik yang meningkat pesat di Indonesia berdampak signifikan terhadap stabilitas moneter dan sistem keuangan negara. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari hal ini adalah: Pengendalian inflasi dan stabilitas moneter: Uang elektronik membantu Bank Indonesia (BI) memantau kebiasaan belanja masyarakat secara real time sehingga dapat mendeteksi potensi inflasi secara dini. Instrumen kebijakan moneter, seperti penyesuaian suku bunga, menjadi lebih efektif karena perubahan tersebut secara langsung mempengaruhi biaya transaksi elektronik, yang pada gilirannya mempengaruhi konsumsi dan investasi. Mengurangi penggunaan uang tunai dan meningkatkan penggunaan uang elektronik mengurangi biaya pencetakan dan pendistribusian uang fisik serta meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Stabilitas Sistem Keuangan: Transaksi digital yang cepat dan aman meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan mengurangi risiko penipuan. Uang elektronik meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan masyarakat akses terhadap layanan keuangan yang tidak dapat diakses melalui sistem perbankan tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A. (2021). "Pengaruh Uang Elektronik terhadap Kebijakan Moneter di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 123- 135.
- Kusuma, R. (2021). "Inklusi Keuangan melalui Uang Elektronik di Indonesia." *Jurnal Keuangan*, 12(1), 45-58.
- Wahyudi, S. (2018). "Uang Elektronik dan Stabilitas Moneter di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(4), 203-217.
- Widiastuti, E. (2021). "Perilaku Konsumen dan Penggunaan Uang Elektronik di Era Digital." *Jurnal Pemasaran*, 13(3), 58-72